

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD VILLAGE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Empiris Di Desa
Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi (S.E)**

Oleh

**DEMA HAYA NESIA
NPM : 1551030023
PROGRAM STUDI : EKONOMI ISLAM
KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD VILLAGE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Empiris Di Desa
Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi (S.E)**

Oleh :

DEMA HAYA NESIA

NPM : 1551030023

**PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH**

Pembimbing I : Dr.Nasruddin, M.Ag.

Pembimbing II : Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Penelitian ini di Latarbelakangi terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan drastis pada tahun 1998 M, Indonesia telah memulai beberapa inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan *Good Governance*, Akuntabilitas Dan Partisipasi yang lebih kuat. Hal ini sebagai awal yang penting dalam menyebarkan gagasan yang mengarah pada perbaikan *Good governance* yang dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem akuntabilitas publik. Secara umum, *Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi. Perwujudan *Good Governance* merupakan cita-cita masyarakat dan senafas dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, karena Pemerintah dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penerapan ADD dan penerapan prinsip *Good Governance* dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, dengan sifat penelitian Deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode analisis data, dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber-sumber yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Good Village Governance* di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah diterapkan dengan cukup baik.

Kata Kunci : *Good Village Governance*, Pengelolaan, Pemerintah Desa

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**PENERAPAN PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE
TERHADAP ALOKASI DANA DESA DALAM
PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa
Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung
Selatan)**

Nama

Dema Haya Nesia

NPM

1551030023

Jurusan

Ekonomi Islam (konsentrasi Akuntansi Syariah)

Fakultas

Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. M. Nasrudin, M.Ag.

NIP. 195809241990031003

Agus Kurniawan, S.E., M.S.A

NIP.

Ketua Jurusan,

Madnasir, S.E., M.S.I

NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ” **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD VILLAGE GOVERNANCE* TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**(Studi Empiris Di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” Disusun oleh Demas Haya Nesia, NPM 1551030023, Prodi Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal. Rabu, 23 Oktober 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Erike Anggraeni, M.E.Sy., D.B.A. (.....)

Sekretaris : Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.S.I. (.....)

Penguji I : H. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji II : Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak. (.....)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Rehan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP: 197905142003122002

MOTTO

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴿٧٣﴾ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٤﴾

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Qs Al Ahzab 72;73)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Ku Ayah Dwi Wiyono Dan Ibu Ismiyatun yang telah ikhlas dan tulus membesarkan ,mendoakan dan membiayai selama aku menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di uin lampung.senyum dan bangga kalian menjadi tujuan hidupku.Semoga Allah SWT memuliakan kalian berdua baik didunia maupun di akhirat.
2. Bapak Nasruddin selaku pembimbing satu yang selalu sabar memberikan arahan, bantuan serta mendoakan sehingga terselesaikan nya skripsi ini.
3. Bapak Agus selaku pembimbing dua yang selalu sabar membimbing, dan memberikan bantuan serta mendoakan sehingga terselesaikan nya skripsi ini.
4. Asrovil Hidayat yang selalu membantu ku,mendoakan ku,dan memberi semangat kepadaku hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Adikku Anjung Wibowo Dan Saudara Sepupu Ku Ani Laraswati yang turut membantu dan mendoakan sehingga terselesaikan nya skripsi ini.
6. Sahabat-Sahabat Terbaikku Yaitu Sari Putri Indah,Aprita Tri Nadia dan Aini Desinta,yang selama ini selalu memberi dukungan,membantu dan juga mendoakan sehingga terselesaikan nya skripsi ini.
7. Teman - Teman Prodi Akuntansi Syariah tahun 2015 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Demas Haya Nesia. Lahir Di Desa Jatibaru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan Pada Tanggal 24 Maret 1997.

Penulis Terlahir Dari 2 Bersaudara Pasangan Ayah Dwi Wiyono Dan Ibu Ismiyatun

Jenjang Pendidikan Yang Telah Di Tempuh Adalah

1. Sekolah Dasar Negeri 3 Jatibaru, Tanjung Bintang ,Lampung Selatan 2003 - 2009
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan 2009 - 2012
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan 2012 - 2015
4. Pada Tahun 2015 - 2019 Penulis Menjadi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Uin Lampung Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kenikmatan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Village Governance* Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” dengan baik dan benar. Sholawat beriringan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat, tabi’in, serta para umatnya.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E), atas terselesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Berikut ini penulis secara rinci mengungkapkan terima kasih kepada :

1. Dr.Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran Wakil Dekan 1, 2, dan 3 yang telah memberika izin penelitian kepada penulis.

2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. sebagai ketua jurusan/prodi Akuntansi Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya, atas arahan yang diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. M. Nasrudin, M.Ag. Dan Bapak Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak. yang merupakan Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik.
6. Para Sahabat yang selalu hadir dan memberi semangat serta nasihat selama 4 tahun masa perkuliahan. Khususnya untuk kelas Akuntansi Syariah A .

Pada akhirnya, penulis mempunyai keinginan mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Menjadi sumbangan pengetahuan dalam pengembangan ilmu yang ada, khususnya dalam ilmu-ilmu keislaman dan ilmu ekonomi di abad modern ini. Aamiin ya rabbal a'lamiiin.

Tanjung Bintang, 15 Juli 2019
Penulis,

Dema Haya Nesia
NPM. 1551030023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Batasan Masalah.....	4
D. Latar Belakang Masalah.....	5
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Desa dan Pemerintah Desa

1. Desa	21
2. Pemerintah desa	21

B. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Proses Perencanaan APBDesa	26
2. Pelaksanaan APBDesa	32
3. Proses Penatausahaan Keuangan Desa	33
4. Proses Pelaporan APBDesa	34
5. Pertanggung Jawaban APBDesa	35

C. *Good Governance*

1. Pengertian <i>Good Governance</i>	36
--	----

D. Indikator *Good Village Governance*

E. Prinsip *Good Governance* Dalam Perspektif Ekonomi Islam

F. Penelitian Terdahulu

G. Kerangka Fikir

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Jatibaru	52
2. Visi Misi Desa Jatibaru	55
3. Keadaan geografis desa jatibaru	56
4. Kondisi Masyarakat desa Jati Baru	57
5. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Jatibaru	64

B. Masalah Dan Potensi Desa

BAB IV ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data Responden.....	76
B. Penerapan prinsip good governance.....	78
C. Deskripsi Hasil Kuesioner.....	84
D. prinsip good governance dalam prespektif ekonomi islam.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penduduk Desa Jatibaru Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 3.2 Sebaran Mata Pencaharian Masyarakat Desa Jatibaru	54
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat	55
Tabel 3.4 Jumlah Prasarana Kesehatan	57
Table 4.1 Data Responden Berdasarkan Usia	71
Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan	72
Tabel 4.4 Data Hasil Kuisisioner Partisipasi Masyarakat	78
Tabel 4.5 Data Hasil Kuesioner Transparansi	79
Tabel 4.6 Data Hasil Kuisisioner Akuntabilitas	80
Tabel 4.7 Perbandingan Praktik Dengan Teori Dan Penelitian Terdahulu	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pemerintah Desa Jatibaru	58
Gambar 3.2 Data Perangkat Desa Jatibaru	59
Gambar 3.5 Masalah Dan Potensi Desa Jatibaru	61
Gambar 3.6 Pemecahan Masalah Desa	64



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait DENGAN JUDUL SKRIPSI INI.¹ ADAPUN JUDUL SKRIPSI INI BERJUDUL “**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Empiris Di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**”.

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup, maka perlu adanya penegasan judul tersebut.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb). Menguraikan suatu pokok atas berbagai bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²

¹ Repository.radenintan.ac.id

² Department Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h.68.

2. Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan dapat berarti sebagai suatu pemakaian atau aplikasi suatu cara atau metode suatu yang akan diaplikasikannya.³

3. Prinsip adalah Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang mnejadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya.⁴

4. *Good village governance* yaitu tata pemerintahan desa yang baik yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan,dan lain-lain).⁵

5. Pengelolaan adalah pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶

6. Alokasi Dana Desa(ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

³ Dwipayana, Aagn. Ari. 2003.Membangun Good Governance .Raja Grafindo Pustaka, Jakarta,h.14.

⁴Shinta Tomuka,Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)

⁵Muhammad Fajar Irawan Prasetyo, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Prinsip Orientasi Konsensus Good Governance.h.3.

⁶Andi Siti Sri Hutami,Analisis Pengelolaan A Lokasi Dana Desa(Add) Di Desa Abbatiireng Keca Matan Gilireng, Kabupaten Wajo,h.19.

Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam (Studi Empiris Di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan).

B. Alasan Memilih Judul

Dalam penelitian ini yang menjadikan alasan mendasar dalam memilih judul ini adalah :

1. Alasan Objektif

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam setiap pengelolaan ADD harus dibuat Peraturan Desa (Perdes) yang didalamnya berisi hasil dari musyawarah desa yang juga harus dilaksanakan dalam tiap desa. Dalam pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan para pelaku dan seluruh masyarakat desa. untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mengelola Alokasi dana desa pemerintah desa dan masyarakat dituntut agar bisa menerapkan tata kelola pemerintah yang baik. Ketertarikan ini dikarenakan dalam penerapan prinsip good governance memiliki peran dan berpengaruh

⁷Asaibani., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bee Mediapustaka, 2015, h.4

besar terhadap alokasi dana desa di setiap kabupaten yang berada di Indonesia. Dalam Penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tanjung Baru kecamatan Tanjung Bintang.

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya yaitu tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di kecamatan Girian Kota Bitung (studi tentang pelayanan akte jual beli).
- b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis geluti saat ini yakni berkenaan dengan akuntansi syariah.
- c. Ketersediaannya data-data dan lokasi yang mudah dijangkau serta literatur yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga cukup mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.

C. Batasan Masalah

Batasan Masalah Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti. Penerapan prinsip *Good Village Governance* Dalam Perspektif ekonomi Islam yang akan diteliti berfokus pada penerapan prinsip transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan karena dalam 3 hal prinsip tersebut merupakan Prinsip-Prinsip Utama Yang Melandasi *Good Village Governance* Dalam Perspektif ekonomi Islam selain itu agar pembahasan tidak terlalu luas dan mudah dipahami oleh pembaca.

D. Latar Belakang Masalah

Menurut permen no 113 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Pengesahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 membawa berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, setiap desa mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa mencapai satu miliar rupiah per desa.⁹

Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi pemerintah desa memperoleh dana yang dapat dikelola relative besar. Di sisi lain, tentunya dana yang relative besar tersebut harus bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu, pemerintah juga telah mempersiapkan beberapa peraturan terkait untuk mendukung akuntabilitas dana desa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 membahas dana desa (sumber pendanaan APBN) yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

⁸V. Sujarweni Wiratna, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.1.

⁹Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016.h.2

Nomor 113 tahun 2014.¹⁰ Kebijakan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola pemerintahan desa yang baik. *Good village governance* merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Prinsip – prinsip *Good village governance* menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Berawal dari arti *good village governance* maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (*performance*) sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan, tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Selain adanya pengaruh globalisasi pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspons oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.¹¹

Namun Para ahli mengakui bahwa sesungguhnya "tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai sebuah model universal bagi negara-negara

¹⁰Inten Meutia Liliana, Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Jurnal. 2017. h. 337.

¹¹Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M. Pd., APU. *Good Governance* "Kepemerintahan Yang Baik" Bagian Pertama Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 4.

berkembang. Akan tetapi setidaknya beberapa ciri dapat diidentifikasi untuk yang menandai apa yang disebut *good village governance* Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud.

Menurut pandangan syari'ah suatu pengertian *governance* termaktub dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَنِ الْأُمُورِ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kekuasaan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'nif dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Al Hajj (22): 41)¹²

Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa *governance* dalam perspektif syari'ah adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniannya sebagaimana disimbolkan oleh penegakan salat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat, dan (3) penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan amar ma'ruf nahi munkar.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Diponogoro, Jawa Barat, 2010, hlm.45

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan melihat penerapan ADD di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang , Kabupaten Lampung Selatan. sehingga dapat menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good village Governance*).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan tersebut maka peneliti menarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip-prinsip good governance dalam penerapan ADD ?
2. Bagaimana penerapan good governance pada ADD di desa Jatibaru?
3. Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* dalam perspektif Islam?

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk Mengkaji konsep dasar *Good Village Governance*
 - b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mendorong terselenggaranya prinsip *Good Village Governance*
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat praktis,yaitu :

Hasil penelitian diharapkan bisa untuk memberikan masukan (input) bagi aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan perannya secara efektif efisien demi terwujudnya bentuk pemerintahan desa yang lebih baik lagi di masa mendatang dan juga dapat memberikan informasi yang lebih akurat berkaitan

dengan alokasi dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.

b. manfaat ilmiah,yaitu :

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bisa memperkaya khasanah pemikiran yang lebih intelektualitas di bidang ilmu pemerintahan desa dan juga bisa meningkatkan kemampuan analisis ilmiah dalam mencermati permasalahan dalam penerapan prinsip good governance terhadap alokasi dana desa

c. bagi penulis

untuk menambah pengetahuan penulis dan juga untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu ekonomi pada Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung

d. bagi almamater

untuk dijadikan sebagai rujukan mahasiswa akuntansi syariah apabila ingin meneliti tentang permasalahan yang sama

G. Metodologi Penelitian

Metode peneltian yaitu cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Sedangkan metode ilmiah yaitu cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut,

konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.¹³

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁴

Selain penelitian lapangan juga di dukung dengan penelitian perpustakaan. penelitian perpustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi.

dengan bantuan bermacam – macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainya.¹⁵

¹³ Suharto, Dkk, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Andi, 2004, h. 99

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, h. 213

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h. 29

1) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskriptif*) lengkap tentang sesuatu yang sedang di teliti. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengertian deskriptif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardalis, bahwa pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.¹⁶

2. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari lokasi penelitian, diperoleh melalui wawancara kepada kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman pengelola keuangan desa dalam memahami cara pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) terstruktur. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari

¹⁶ H. Moh. Pobundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Cet. Pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 226

¹⁷ Iqbal Hasan, MM, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Cet. Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82

informasi mengenai peran pemerintah desa dalam menerapkan prinsip good village governance terhadap alokasi dana desa.

b. Data sekunder

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan ,buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah Data yang diperoleh dari lembaga ataupun instansi yaitu dari pemerintahan desa jati baru kecamatan tanjung bintang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang di pelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

¹⁸ *Ibid*, h. 82

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet ke-20, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 80.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah desa dan masyarakat desa jatibaru kecamatan Tanjung Bintang

b. Purposive Sampling

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁰ Sedangkan teknik purposive sampling mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.

Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu redaksi terhadap jumlah objek penelitian. Tujuan lain dari penentuan sampel ialah untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan.²¹ Jadi yang dimaksud dengan sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada yaitu

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Kepala Desa | = 1 orang |
| 2. Sekretaris Desa/ perangkat desa | = 3 orang |
| 3. Bendahara Desa/perangkat desa | = 3 orang |

²⁰ *Ibid.* h. 81

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.55.

4. Ketua BPD	= 1 orang
5. Anggota LPMD	= 2 orang
6. Perwakilan Masyarakat/Kadus	= <u>10 orang</u>
Sejumlah	20 orang

Sampel purposive sampling sejumlah 20 merupakan orang - orang yang memenuhi kriteria dalam penelitian karena merupakan orang-orang yang mengetahui tentang pengelolaan dana desa.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²²

Dalam hal ini jenis observasi yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian dengan non partisipasi. Dimana penelitian tidak terlibat langsung sebagai peserta dan bukan merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Tujuannya untuk mengamati lokasi penelitian secara langsung terhadap melihat seberapa jauh prinsip *Good Village Governance* di terapkan di desa Jatibaru.

²² Soeratno, Lincolin Arsyad, M.S.c, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008) h.83

b. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face* antara *interviewer* dengan *interviewee*.²³

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁴ Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian.

Adapun dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai kepada Kepala Desa , Sekretaris Desa , Bendahara Desa , Dan Kepada Masyarakat Desa Jatibaru untuk memperoleh data yang kuat peneliti juga akan mewawancarai ketua BPD yang berasal dari Desa Jatibaru untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip *Good Village Governance* terhadap Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Islam

²³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, h. 152

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet ke-20 (Bandung: Alfabeta, 2014, h.138

c. Kuesioner

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan serangkaian daftar pertanyaan (terlampir) kepada para pejabat desa dan perwakilan masyarakat Desa Jatibaru yang menjadi responden dalam penelitian ini. Kuesioner ini akan digunakan untuk memperoleh data tentang apakah prinsip *Good village Governance* yang dibatasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat diterapkan atau tidak diterapkan pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.²⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumenter seperti foto-foto, video, hasil rekaman, catatan harian, laporan, serta website resmi lainnya.

5. Metode Pengelolaan data

- a. Editing (Pemeriksaan Data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.²⁶

²⁵ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, h.160

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 1996, h.

- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil observasi sehingga memudahkan penulis untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.

6. Tehnik Analisa data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Deskriptif Kualitatif. Dalam menjawab rumusan masalah tentang “Apakah prinsip *Good Village Governace* telah diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Jatibaru”, peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Menjumlah jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. Peneliti akan menjumlah jawaban “ya” pada kuesioner yang berarti bahwa prinsip *Good Village Governance* telah diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan jawaban “tidak” yang berarti bahwa prinsip *Good Village Governace* tidak diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b. Mempersentasekan jumlah jawaban dari kuesioner Peneliti akan membagi jumlah responden yang menjawab ya atau tidak dari setiap pertanyaan kuesioner dengan jumlah seluruh responden yaitu 20 orang responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris

Desa, bendahara desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan dan 1 (satu) anggotanya, 2 (dua) orang pegawai, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), 1 Anggota Bumdes, Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), 1 Kepala Dukuh di Desa Jatibaru dan 8 orang masyarakat awam. Hasil dari pembagian tersebut akan dikalikan dengan 100% sehingga akan menghasilkan persentase jumlah jawaban ya atau tidak dari setiap pertanyaan.

c. Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah dipersentasekan.

Peneliti akan menganalisis total jawaban yang telah dipersentasekan. Total persentase akan menghasilkan pembahasan mengenai prinsip *Good Village Governace* yang diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Jatibaru

d. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan.

Peneliti akan mendeskripsikan hasil jawaban wawancara dari para narasumber Kepala Desa, Sekretaris Desa, bendahara desa dan masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana penerapan prinsip *Good Village Governace* dalam perencanaan Alokasi Dana Desa jatibaru.

e. Menganalisis hasil wawancara yang telah di deskripsikan

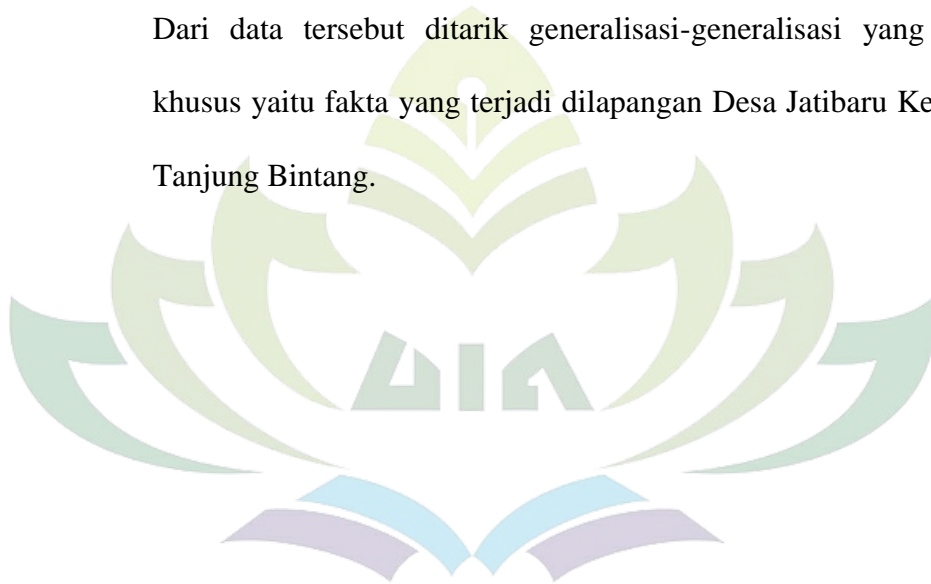
Peneliti akan menganalisis jawaban para narasumber yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, bendahara desa, masyarakat mengenai penerapan prinsip *Good Governace* dalam perencanaan Alokasi

Dana Desa. Selain itu, peneliti akan menganalisis kesesuaian antara hasil jawaban wawancara tersebut dengan hasil jawaban kuesioner. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mendapatkan hasil pembahasan yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip *Good Village Governace* dalam perencanaan Alokasi Dana Desa Jatibaru.

- f. Menarik kesimpulan dari hasil analisis jawaban kuesioner dan jawaban wawancara. Peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah prinsip *Good Village Governace* telah diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa.
- g. Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisa data tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data yang verbal atau masih dalam keterangan-keterangan saja. Analisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan menguraikan

dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif.²⁷

Deduktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum, yang kemudian dari fakta-fakta yang bersifat umum dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Dari data tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat khusus yaitu fakta yang terjadi dilapangan Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang.



²⁷Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Cet ke 20 (Bandung : Alfabeta , 2014 , h.245

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Desa dan Pemerintah Desa

1. Desa

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Desa juga disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁹

2. Pemerintah desa

a. Pemerintah dan Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam

²⁸ V.Sujarweni Wiratna, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.1.

²⁹ Widjaja, HAW. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh., (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h.3

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah badan yang melakukan kekuasaan untuk memerintah³⁰

b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Menurut UU no 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³¹

c. Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.³²

d. RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintahan Desa)

perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi atau Penentuan strategi, kebiaksanaan, proyek,

³⁰Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT Refika Aditama.h.97.

³¹V.Sujarweni Wiratna,*Akuntansi Desa* , (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2015), h.9.

³²V.Sujarweni Wiratna,*Akuntansi Desa* , (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2015),h.17.

program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 79 pasal (1) menyebutkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Senada dengan pernyataan tersebut ayat (2) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun berjangka meliputi :

- 1) Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- 2) Rencana pembangunan Tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka.³³

e. APBDesa dan Dana Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang di biayai dengan

³³ Handoko, Hani, *Manajemen, edisi 2*. (Yogyakarta:BPFE, 2003).h.23

uang desa.dalam APBDes berisi pendapatan,belanja dan pembiayaan desa.³⁴

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan,pembinaan,kemasyarakata dan pemberdayaan masyarakat.³⁵

f. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa

Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa tersebut terdiri dari Sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Masing-masing dari perangkat desa tersebut memiliki tugas yang dilaksanakan, antara lain:

1) Sekretaris desa

Sekretaris desa sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

³⁴ V.Sujarweni Wiratna,*Akuntansi Desa* , (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2015), h.33

³⁵ Tim Redaksi Laksana,Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa ,Laksana 2019.h.135.

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.³⁶

2) Kepala seksi

Kepala seksi sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri no 113 tahun 2014 pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi sebagaimana dimaksud memiliki tugas, antara lain:

- a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa.

³⁶V.Sujarweni Wiratna, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.31.

- c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa.
- f) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.³⁷

3) Bendahara desa

Bendahara sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri 113 tahun 2014 dijabat oleh staf pada bagian keuangan. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, menyetor -kan /membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.³⁸

B. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Proses perencanaan APBDesa

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa).

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

Penjelasan UU No.6 tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut Musrembang Desa memiliki pokok pikiran yang diurai. sebut Forum musyawarah, merupakan forum diskusi dengan mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara terbuka untuk bersepakat dengan bulat serta mufakat menentukan sesuatu pilihan yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, kalimat partisipatif yang menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kebulatan keputusan yang dimana dilibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat lebih manghayati dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di desa, Hasil Musrembang Desa ini dimuat dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).³⁹

Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDesa).

³⁹ Rianingsih Djohani, *Paduan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa*, (Bandung:FPPM, 2008), h. 87

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Berdasarkan PP No.43 tahun 2014, RPJMDesa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yang mana rancangan ini memuat visi dan misi dari kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No.114 Tahun 2014).

Tujuan RPJMDesa bertujuan untuk :

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- 2) Menciptakan rasa saling memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- 3) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- 4) Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam pelaksanaannya sesuai Permendagri No.114 tahun 2014 kepala desa yang menyelenggarakan penyusunan RPJMDesa wajib mengikut sertakan unsur masyarakat desa dan

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, prioritas program, dan kegiatan kabupaten/kota.⁴⁰

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Berdasarkan Permendagri No.114 tahun 2014, RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk rencana kerja 1 tahun.⁴¹ yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maupun baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMDesa.

Permendagri No.114 tahun 2014 menjelaskan bahwa RKPDesa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDesa disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKPDesa di tetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan untuk selanjutnya

⁴⁰ Hamzah, Ardi. *Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Surabaya : Pustaka. 2016. h. 67.

⁴¹ V. Sujarweni Wiratna, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 174

menjadi dasar penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana- rencana program yang di biayai dengan uang desa dalam APBDes berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.⁴²

Tata kelola pemerintah yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa telah dikelola dengan baik.

Berikut ini merupakan fungsi-fungsi APBDesa, antara lain :

- 1) Fungsi otorisasi. APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk

⁴²*Ibid.h.33*

melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada periode yang bersangkutan.

- 2) Fungsi Perencanaan. APBDesa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan .
- 3) Fungsi pengawasan. APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Fungsi alokasi. APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan desa.
- 5) Fungsi distribusi. Kebijakan APBDesa harus memerhatikan keadilan dan kepatuhan masyarakat.
- 6) Fungsi akuntabilitas. APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa. Hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.⁴³

⁴³ Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Surabaya : Pustaka. h.30

2. Pelaksanaan APBDesa

Berikut merupakan beberapa kebijakan terkait dengan pelaksanaan APBDesa berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014, antara lain :

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten / kota.
- c. semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa yang jumlahnya telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota
- f. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa ini tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- h. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.

3. Proses Penatausahaan Keuangan Desa

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, bendahara desa wajib mem pertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. laporan pertanggung jawaban bendahara disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.⁴⁴

Dalam permendagri No.113 tahun 2014 menyebutkan bahwa penatausahaan, penerimaan, dan pengeluaran tersebut wajib dilaksanakan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan yang berupa uang tunai yang ada pada bendahara desa.

⁴⁴V.Sujarweni Wiratna, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), H.59

Buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat setiap kas yang berupa hasil dari pemotongan pajak dan penyetoran uang kas tersebut ke rekening negara. Buku bank digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas pada bank.⁴⁵

4. Proses Pelaporan APBDesa

Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan Semester Pertama.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun.

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud merupakan laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli pada periode berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.⁴⁶

⁴⁵Ibid.h.61

⁴⁶Ibid. h.193

5. Pertanggung Jawaban APBDesa

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Peraturan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus dilampiri oleh:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- c. Format Laporan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.⁴⁷

⁴⁷Ibid.h.194

C. *Good Governance*

1. Pengertian good governance

Pengertian *Good Governance* secara konseptual pengertian kata baik(*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman yaitu Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan /kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampun rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.⁴⁸

Sedangkan menurut IAN & BPKP yang dimaksud dengan *good governance* adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip - prinsip profesionalitas , akuntabilitas , transparansi , pelayanan prima , demokrasi , efisiensi , efektivitas , supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.”⁴⁹

a. Prinsip-Prinsip Good Governance

OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) dan World Bank mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan

⁴⁸ Prof.DR.Hj.sedarmayanti,M.Pd.,APU,*good governance* “Kepemerintahan Yang Baik”Bagian Kedua Edisi Revisi.Penerbit Mandar Maju.h.3.

⁴⁹ IAN & BPKP. 2005. *Pelayanan Publik*.Malang: CV Citra Malang.h.5

bertanggung jawab , sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien , penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka , dan pencegahan korupsi , baik secara politik maupun administratif , menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan.⁵⁰

Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut :

1) Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan , baik secara langsung maupun lembaga perwakilan , sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.

Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat , serta kebebasan untuk ber partisipasi secara konstruktif.⁵¹

Apabila dikaitkan dengan perencanaan APBDes , partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat diperlukan dalam merencanakan pembangunan yang akan dilakukan guna untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah.

⁵⁰ Prof.DR.Hj.Sedarmayanti,M.Pd., APU.*Good Governance*”Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Pertama Edisi Revisi,(Bandung:Mandar Maju,2012),h.7.

⁵¹ *Ibid.*

Apabila masyarakat tidak aktif dalam menyampaikan aspirasinya, maka pembangunan yang dilakukan dalam suatu daerah akan terhambat atau tidak merata.

2) Kepastian Hukum (Rule Of Law)

Kerangka aturan hukum dan perundangan-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (*impartialy*), terutama tentang aturan hukum dan hak azasi manusia.⁵²

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintahan desa diharuskan untuk menerapkan semua aturan-aturan yang sudah disahkan oleh pemerintahan pusat guna untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terhindar dari segala sesuatu yang bersifat merugikan negara.

Oleh karena itu, regulasi atau aturan yang telah ditetapkan oleh Negara harus ditetapkan dan dilaksanakan guna untuk menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang baik dan terhindar dari kecurangan atau kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang akan terjadi apabila tidak menaati hukum dan regulasi tersebut.

3) Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan arus informasi proses lembaga dan informasi secara

⁵²*Ibid.*

langsung harus dapat di terima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dapat di pantau.⁵³

Dalam Permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa dituntut untuk transparan atau terbuka kepada masyarakat. Oleh sebab itu, maka masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa yang ada di desa tersebut seperti apa dimulai dari perencanaan APBDesa, hingga realisasi APBDesa. Dengan adanya prinsip transparansi, masyarakat juga dituntut untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam pengawasan pelaksanaan APBDesa yang telah di susun dan disetujui.

4) Tanggung Jawab (Responsiveness)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan

⁵³ *Ibid.*

masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik

Dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri no 113 tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan laporan realisasi anggaran dana desa kepada bupati. Selain itu, Kepala Desa juga bertanggung jawab untuk mengendalikan perangkat desa dalam rangka merealisasikan anggaran APBDesa yang telah direncanakan Bendahara, Sekertaris Desa, dan Kepala Seksi juga bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas Pengelolaan Keuangan Desa.

5) Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)

good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.⁵⁴

6) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

⁵⁴ *Ibid.h.8*

7) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (Decision Maker) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder).

Perbedaan antara Akuntabilitas dan Responsibilitas yaitu pada saat seorang Kepala Desa merasa ia memiliki tanggungjawab untuk melakukan transparansi kepadamasyarakat, hal ini merupakan prinsip dari responsibilitas. Namun ketika Kepala Desa menyampaikan anggaran kepada masyarakat mengenai realisasi anggaran tersebut, maka ini disebut dengan prinsip akuntabilitas.

8) Visi Strategis (Strategic Vision)

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan publik harus mempunyai prespektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yng diperlukan untuk pembangunan semacam ini.⁵⁵

D. Indikator *Good Village Governance*

Pemerintah desa yang telah mewujudkan *Good Village Governance*, memiliki indikator antara lain: pertama, tata kelola keuangan desa yang baik. Kedua, perencanaan desa yang partisipatif,

⁵⁵*Ibid.*

terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional. Ketiga, berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum. Keempat, mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat⁵⁶

E. Penerapan prinsip *Good Governance* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik semula banyak diusung oleh lembaga-lembaga bantuan internasional dalam rangka upaya mengefektifkan dan menyukseskan program-program bantuan mereka di negara-negara dunia ketiga yang banyak mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh buruknya sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara dunia ketiga tersebut yang ditandai dengan maraknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimaksudkan sebagai perbaikan dan perluasan terhadap konsep pemerintahan (*government*) selama ini yang dipandang tidak memadai. Konsep *governance* (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep pemerintah (*government*) karena di dalam yang pertama, yaitu *governance*, terkandung pengertian bahwa pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah (*government*) sendiri tetapi juga bersama-sama dengan aktor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat.

⁵⁶ Temenggung, Yuswandi A. (2016). Rural Financial Managements Perspective Law No. 6 of 2014 Concerning the Village. *International Journal of Social Sciences* Vol.43. No.1 ISSN 2305-4557

Para ahli mengakui bahwa sesungguhnya "tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai sebuah model universal bagi negara-negara berkembang. Akan tetapi setidaknya beberapa ciri dapat diidentifikasi untuk yang menandai apa yang disebut *good governance* Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud.

Menurut pandangan syari'ah suatu pengertian *governance* termaktub dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kekuasaan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'nif dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Al Hajj (22): 41)⁵⁷

Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa *governance* dalam perspektif syari'ah adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniannya sebagaimana disimbolkan oleh penegakan salat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat, dan (3) penciptaan

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Diponogoro, Jawa Barat, 2010, hlm.45

stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan amar ma'ruf nahi munkar.

Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga aspek *governance*, yaitu:

1. *spiritual governance*,
2. *economic governance*,
3. *political governance*.

Untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam tiga aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditemukan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Nilai dasar pertama, yaitu syura, ditegaskan di dalam alqur'an;

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
(Surat Ali 'Imran Ayat 159)

Dari nilai dasar syura ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat melalui musyawarah. Adanya partisipasi masyarakat luas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan adalah salah satu prinsip penting *Good Governance*. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek belaka dari suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut. Hal ini diharapkan

dapat memberikan legitimasi lebih besar dan dukungan kuat terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil. Dalam kaitan dengan kepemimpinan, menjadi suatu ukuran keidealan pemimpin apabila ia dapat melibatkan seluas mungkin partisipasi warga masyarakat dalam berbagai keputusan. dalam suatu *good governance*. Pemerintah harus bersifat transparan dan mengambil kebijakan dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat secara luas. sehingga dengan demikian ia memiliki akuntabilitas yang tinggi. *Accountability* atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di-*hisab* (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. (QS Al Zalzalah : 7-8)⁵⁸

Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Diponogoro, Jawa Barat, 2010, hlm.111

dan Muslim disebutkan,⁵⁹ “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya...” (HR al-Bukhari no. 2751 dan HR Muslim No 4828).

Dalam kaitannya dengan konsep *good governance*, komitmen seorang pemimpin dan juga para pemegang amanah di pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju *good governance*, karena hal ini akan berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab seseorang dalam memegang amanahnya menjadi seorang *leader*. Seorang pemimpinlah yang akan mempengaruhi pengikutnya (dalam konteks pemerintahan adalah para jajaran stafnya) menuju ke arah yang lebih baik (*good governance*).

Konsep transparansi dalam perspektif islam, sudah ada dalam firman allah dalam (QS 2:282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

⁵⁹ Jmf.fisipol.ugm.ac.id

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
 أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al-Baqarah 2:282)⁶⁰

⁶⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Diponogoro, Jawa Barat, 2010, hlm.10

Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Dari semua penjelasan diatas terkait dengan good governance dalam perspektif islam dapat di tarik kesimpulan bahwa Kegiatan Musrembang dan pemasangan banner informasi merupakan salah satu contoh penerapan prinsip good governance perspektif islam.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelahan terhadap penelitian terdahulu. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang punya kemiripan dengan judul yang di angkat sehubungan dengan analisis penerapan prinsip good governance dalam alokasi dana desa yang dapat dijadikan bahan acuan dan masukan dalam penelitian ini. Pertama, Agus Subroto yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung” dari penelitian tersebut di dapati hasil bahwa dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di wilayah kecamatan tlogomulyo sudah berdasarkan pada prinsip tanggung gugat maupun prinsip tanggung jawab, meskipun sepenuhnya belum sesuai dengan ketentuan yang ada dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan

tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Dwi Febri Arifiyanto Taufik Kurrohman yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember" dari penelitian tersebut didapati hasil bahwa Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa Se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).⁶²

Ketiga, Penelitian Ini Dilakukan Oleh Ray Septianis Kartika Yang Berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Di Desa Tageswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo" hasil penelitian menyebutkan bahwa masyarakat desa tageswetan dan desa jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan alokasi dana desa. tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa. merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa tersebut..berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Adi Suarnata, Anantawikrama

⁶¹Agus subroto,jurnal,Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana DesaDi Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung,2008.

⁶²Dwi Febri Arifiyanto ,Taufik Kurrohman, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember,*Jurnal*,2014.

Tungga Atmaja, Ni Luh Gede Erni Sulindawati hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Manikliyu Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai ADD kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, kesibukan masyarakat dan politik. Selain ada penyebab juga ada kendala yang di hadapi seperti sumber daya manusia yang kurang, kurangnya pembinaan dalam mengelola ADD, koordinasi yang kurang baik, dan keadaan alam di desa. Dan ada pula cara mengatasi penyebab kurangnya partisipasi masyarakat adalah dengan cara sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), diterapkannya sanksi atau denda.

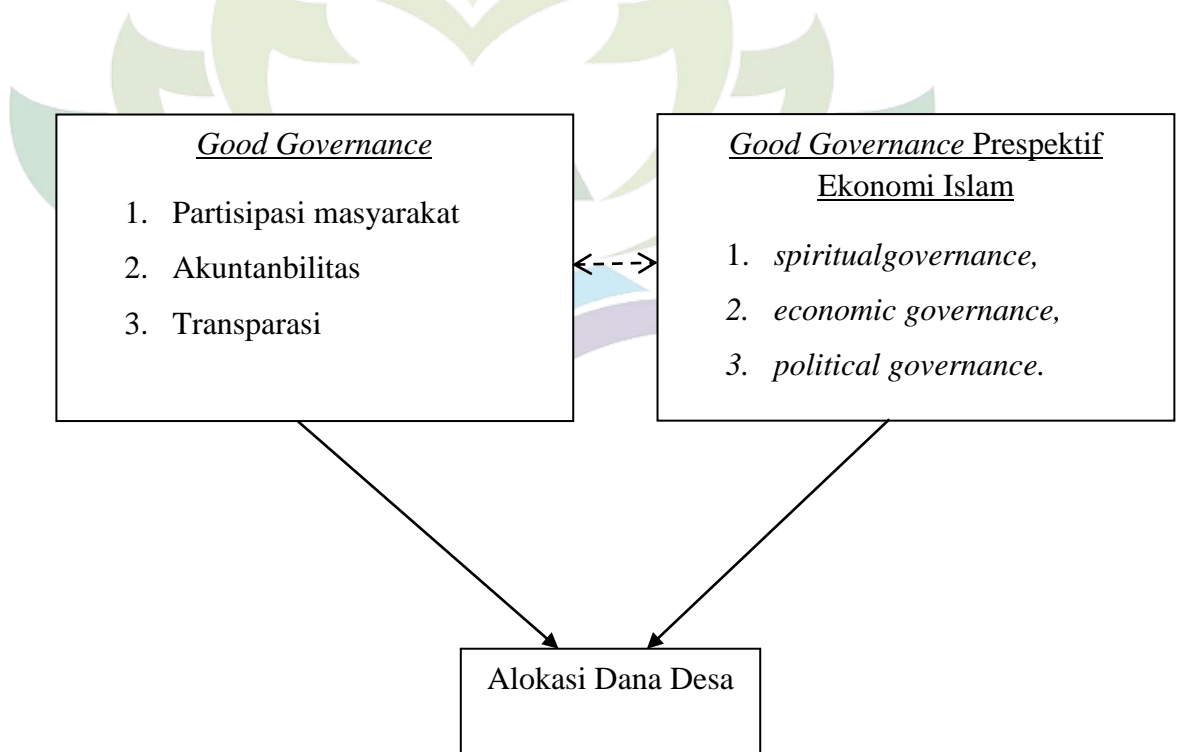
Ke empat, Penelitian Ini Dilakukan Oleh Suci Indah Hanifah yang berjudul Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen keuangan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)⁶³

Berdasarkan dari penelitian tersebut maka penelitian yang di lakukan peneliti akan lebih memfokuskan pada akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa.

⁶³Suci Indah Hanifah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. h.8. (2015).

G. Kerangka Fikir

Dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan alokasi dana desa, peneliti akan menggunakan instrumen prinsip-prinsip *good governance* untuk menganalisis sejauh mana langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Jatibaru kecamatan tanjung bintang dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila sistem yang saling mengawasi dan saling mengimbangi. Penelitian mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat di gambarkan dalam skema sebagai berikut:



BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Jatibaru

Pada tahun 1956 pada saat Kepala Susukan (sebutan pemerintahan yang tingkatannya diatas desa/kelurahan dibawah kecamatan kemungkinan pada saat definitif menjelang pemekaran kecamatan) Bapak M. AMIR, pada saat bersih desa dilakukan sayembara pemberian nama desa. Dari sejumlah nama desa yang diajukan terpilihah nama desa yang diusulkan oleh Bapak S. Ambar Utamaning yaitu nama “TANJUNG BINTANG”.

Nama “TANJUNG BINTANG” ini menurut beliau mempunyai makna : TANJUNG BINTANG terdiri dari 2 kata yaitu “TANJUNG” dan BINTANG”. TANJUNG dalam bahasa indonesia mempunyai pengertian “Daratan yang menjorok ke Lautan” kondisi yang sesuai untuk menggambarkan keadaan tanah “OBYEK” berada diujung selatan Pulau Sumatera. dan terletak diantara Kota Tanjung Karang dengan Sungai Way Sekarang Bintang. Sementara dalam bahasa Jawa: “TANJUNG” merupakan nama bunga. Dengan harapan semoga siapapun nantinya akan suka/menyukai tinggal di tanah ini.

Sementara kata BINTANG sebagai peringatan bahwa para pendiri desa ini semuanya memiliki TANDA BINTANG (yang dimaksud Para Tentara yang mendapat Bintang Jasa setelah berhasil merebut dan mempertahankan Kemerdekaan). Kata BINTANG dalam bahasa Jawa merupakan tempat /alat terbuat dari bahan kuningan

untuk menaruh Cangkir/gelas minuman yang hendak disuguhkan kepada tamu. Selain itu BINTANG pada umumnya batuan yang bercahaya terlihat sangat tinggi dan jauh. Dengan harapan semoga Tanjung Bintang Kelak dapat dikenal orang sampai ke mancanegara. Hal ini mulai terwujud ketika beberapa tahun kemudian ada kunjungan pemuda dari Jambi yang melakukan Study Banding di Tanjung Bintang, disusul kemudian pertukaran pemuda/pelajar dari Australia dan kunjungan pemuda dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

a. Pembuatan Pasar

Pada tahun 1964 lokasi pertama untuk Pasar adalah tempat Kantor Balai Desa Jatibaru sekarang. Seiring dengan perkembangannya disekitar pasar tersebut sudah berdiri bangunan-bangunan pendidikan (SDN 1 Jatibaru sekarang) dan Pemerintahan (Kantor Kecamatan, KUA, Puskesmas) maka agar kegiatan pasar tidak mengganggu proses pendidikan dan pemerintahan, Pasar kemudian dipindahkan ke Lokasi Pasar “Tanjung Bintang sekarang”. Pengadaan Pasar pada zaman Kepala Desa Bapak M. Amir dengan membeli tanah Bapak. Sutoko (Alm). Pengurus pasar ditunjuk Bapak. S. Ambar, Bapak Saimun (Alm), Bapak Paiman (Alm) dan Bapak Paimin. Dalam rangka bersih desa sekaligus meramaikan pasar diadakan

pertunjukan kesenian wayang dan kesenian tradisional di lokasi pasar.

Demikian hingga proses pembangunan pasar secara bertahap dapat diselesaikan, dalam perkembangan selanjutnya Pasar Tanjung Bintang ini mengalami kemajuan yang pesat sehingga masyarakat yang berasal dari desa-desa dan kecamatan sekitar datang ke pasar Tanjung Bintang mengalahkan pasar-pasar yang sudah terbentuk lebih dahulu (seperti Merbau Mataram, Suban dll) sehingga kondisi sekarang sudah terasa sangat sempit bahkan masyarakat melakukan jual-beli di pinggir jalan raya yang berdampak terjadinya kemacetan pada saat hari-hari pasaran maupun hari-hari biasa.

b. Tanjung Bintang Menjadi Kecamatan

Melihat Kondisi TANJUNG BINTANG yang semakin ramai, Pemerintah bermaksud menjadikan TANJUNG BINTANG sebagai Kota dengan merelokasikan Penduduknya ketempat pemukiman baru yang masih berupa Hutan, Namun Warga Masyarakat menolak dengan mengingat betapa jerih payah dahulu menjadikan desa ini. Beberapa tahun kemudian terjadi pemekaran Kecamatan sehingga TANJUNG BINTANG, SERDANG, JATIBARU (dulu nama sebuah desa yang terletak di Kedaton IX sekarang) SINAR OGAN terpisah dari kecamatan Kedaton membentuk kecamatan sendiri. Akhirnya Nama "TANJUNG

BINTANG” dipakai sebagai nama Kecamatan, Desa Jatibaru bergabung dengan Desa Serdang sebagian (Kedaton IX) dan sebagian (Sekarang Jati Indah) ikut Desa yang dulu wilayah desa TANJUNG BINTANG.

Nama JATIBARU akhirnya dipakai menjadi nama desa yang menggantikan nama desa TANJUNG BINTANG yang menduduki wilayah ibukota kecamatan. Sehingga Sekarang Desa JATIBARU yang wilayahnya Ex Wilayah Desa TANJUNG BINTANG ini telah dimekarkan menjadi beberapa desa seperti : Desa Jati Indah, Desa Trimulyo, Desa Budi Lestari dan Desa Srikaton. Nama JATIBARU sendiri kurang populer oleh masyarakat, sehingga sampai sekarang masyarakat desa sekitar menyebut JATIBARU masih dengan sebutan “TANJUNG BINTANG”

2. Visi Misi Desa Jatibaru

Visi desa Jatibaru adalah mewujudkan desa jatibaru menjadi desa yang berseri-seri (bersih, sehat, rindang, serasi dan mandiri).

Untuk mewujudkan visi tersebut maka desa Jatibaru memiliki misi:

- a. BERSIH : Menciptakan Budaya Bersih dengan program Minggu Bersih di setiap Dusun yang dilaksanakan setiap bulan pada Minggu pertama.
- b. SEHAT : Dengan membuat Draenase di setiap Jalan Desa, Mengupayakan Jamban Keluarga yang permanen di setiap

keluarga, dan menyediakan Sarana Posyandu sesuai kebutuhan.

- c. RINDANG : Mengupayakan penanaman pohon-pohon di Tepi-tepi Jalan dan pekaaranan Warga bekerjasama dengan seluruh masyarakat.
- d. SERASI : Menciptakan kondisi lingkungan yang serasi dengan membuat taman dan gapura antar dusun sebagai pembatas wilayah.
- e. MANDIRI : Mengupayakan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

3. Keadaan geografis desa jatibaru

Secara geografis Desa jatibaru merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tanjung bintang yang mempunyai luas wilayah mencapai 966,84 Ha. Desa jatibaru merupakan salah satu Desa dari 16 (enam belas) Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Tanjung bintang Kabupaten lampung selatan, Desa jatibaru berada pada ketinggian 300 M diatas permukaan laut dan curah hujan ± 2000 mm, rata-rata suhu udara 30° celcius.

Desa jatibaru termasuk wilayah Kecamatan tanjung bintang lampung selatan Kabupaten lampung selatan. Desa jatibaru memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Jati Indah

- b. Sebelah Selatan : Desa Sinar Ogan
- c. Sebelah Barat : Desa Serdang
- d. Sebelah Timur : Desa Budi Lestari

4. Kondisi Masyarakat desa Jati Baru

Data komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang maupun dalam dunia usaha. Jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat maka, kesejahteraan masyarakat diukur dari beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan ukuran pencapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak dan berkembang atau tidak.

a. Jumlah Penduduk

Penduduk di Desa jatibaru pada tahun 2019 terdiri dari 11.156 jiwa yang terdiri atas laki-laki, 5.408 jiwa, perempuan 5.748 jiwa dan 2758 jumlah kepala keluarga (KK).

Tabel 3.1

Penduduk desa jatibaru Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jeniskelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	

	5.408 jiwa	5.748 jiwa	11.156 jiwa
--	------------	------------	-------------

Sumber: *Profile desa jatibaru 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di desa jatibaru berjumlah 11.156 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki.

b. Mata Pencaharian Pokok

Indikator umum yang sering digunakan dalam mengukur kualitas sumber daya manusia adalah mata pencaharian. Adapun sebaran mata pencaharian masyarakat Desa Jatibaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Sebaran Mata Pencaharian Masyarakat Desa Jatibaru

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani	2569	54.43 %
2.	Buruh Tani	258	5.46 %
3.	Pertukangan	411	8.70 %
4.	Tni/Polri	18	0.38 %
5.	Wiraswasta	623	13.20 %
6.	Swasta	717	15.19 %
7.	Jasa	67	1.41 %
8.	Pensiunan	56	1.18 %
	Total Jumlah	4719	100% %

Sumber: *Profile desa jatibaru 2019*

c. Pendidikan

Indikator pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah. Pendidikan diharapkan akan menambah produktifitas penduduk. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumberdayanya. Tingkat pendidikan di desa jatibaru terdiri dari masyarakat yang belum sekolah, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, sampai tamat di Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Tingkat pendidikan masyarakat

NO	Tingkat pendidikan Masyarakat	Jumlah	Satuan
1	. Taman Kanak – Kanak	668	Orang
2	Sekolah Dasar	1536	Orang
3	SLTP/SMP	1546	Orang
4	SMA/SMK	3567	Orang
5	Akademi D1 - D3	1254	Orang
6	Sarjana S1 - S2	684	Orang

Sumber: *Profile desa jatibaru 2019*

No	Lulusan pendidikan khusus	Jumlah	Satuan
1	Pondok pesantren	208	Orang
2	Madrasah	512	Orang
3	Lain lain	387	Orang

Sumber: *Profile desa jatibaru 2019*

d. Kesehatan

Kesehatan memberikan peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata.

Untuk kesehatan di desa jatibaru terdapat sarana prasarana kesehatan yang terdiri dari puskesmas dan posyandu untuk melayani masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Jumlah Prasarana Kesehatan

No.	PrasaranaKesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1 unit
2.	Posyandu	8 unit
3	Klinik	2 unit

Sumber: *Profile desa jatibaru 2019*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa prasarana kesehatan yang paling banyak di desa jatibaru adalah posyandu dan yang paling sedikit adalah puskesmas, Hal ini menunjukkan kesadaran

masyarakat akan tentang kesehatan sudah cukup tinggi karena sudah banyak prasarana kesehatan di desa jatibaru

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa jatibaru diperoleh informasi bahwa untuk memperoleh layanan kesehatan biasanya diperoleh di puskesmas dengan mambawa kartu berobat KIS dan BPJS⁶⁴. Dari hal diatas maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di desa jatibaru sudah cukup baik.



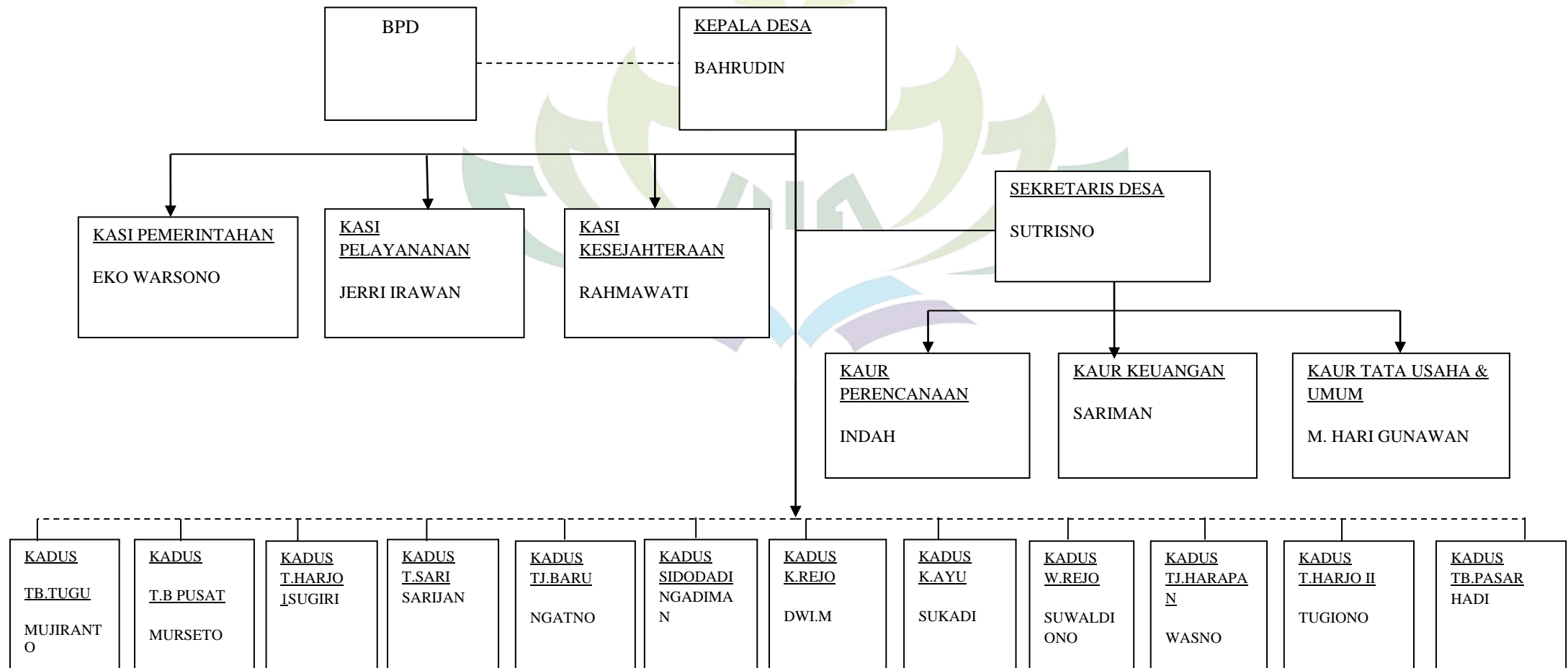
⁶⁴Sumber Wawancara,Ibu Suminem,Desa Jatibaru,27 Februari 2019

e. Struktur Pemerintahan Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang

Gambar 3.1

STRUKTUR PEMERINTAH DESA JATIBARU

TAHUN 2019



f. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Jatibaru

Gambar 3.2**Data perangkat desa jatibaru****Tahun 2019**

NO	JABATAN	NAMA	L/P	PENDIDIKAN
1.	Kepala Desa	Bahrudin	L	SLTA
2.	Sekretaris Desa	Sutrisno	L	SLTA
3.	Kasi Pemerintah	Eko warsono	L	SMK
4.	Kaur Tata Usaha & umum	M.hari gunawan	L	S1
5.	Kasi Pelayanan	Jerri irawan	L	SLTA
6.	Kasi Kesejahteraan	Rahmawati	P	STM
7.	Kaur Perencanaan	Indah listiana	P	S1
8.	Kaur Keuangan	Sariman	L	SLTA
9.	Kadus Tb.Tugu	Mujiranto	L	SLTP
10.	Kadus Tb.Pusat	Murseto,s.p.d	L	S1
11.	Kadus TB.Pasar	Hadi rahman	L	SLTA
12.	Kadus Totoharjo I	Sugiri	L	SLTA
13.	Kadus Tanjung Sari	Sarijan	L	SLTP
14.	Kadus Tanjung Baru	Ngatno	L	SLTA

15.	Kadus Sidodadi	Ngadiman	L	SLTA
16.	Kadus Kalirejo	Dwi murdiadi	L	A.Md
17.	Kadus Kaliayu	Sukadi	L	SLTP
18.	Kadus Waluyorejo	Suwaldiono	L	SLTP
19.	Kadus Tj. Harapan	Wasmo	L	SD
20.	Kadus Totoharjo II	Tugiono	L	SD

Sumber : *pemerintah desa jatibaru*



g. Masalah Dan Potensi Desa Jatibaru

Berdasarkan rangkuman hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang) tentang berbagai masalah yang dihadapi pemerintah Desa dan Warga desa, berikut ini disampaikan daftar temuan masalah dan potensi desa sebagai berikut :

Gambar 3.5 Masalah Dan Potensi Desa Jatibaru

No	MASALAH	POTENSI
1	Jalan Desa sering terjadi banjir, Licin, Longsor karena pembangunan siring dan gorong-gorong serta jembatan dan tanggul penahan tanah belum ada	-Batu
		- Pasir
		- Tenaga gotong royong dan pekerja
2	Penghubung Jalan antar Dusun serta antar Desa belum memadai sehingga perjalanan menjadi jauh	- Lahan jalan
		- Pasir dan Batu
		- Tenaga gotong royong dan pekerja
3	Kegiatan Posyandu masih menumpang di rumah penduduk	- Bidan Desa
		- Kader-kader Desa
		- Tanah kas Desa
4	Masih banyak Pemuda/I belum bekerja sehingga banyak pengangguran dan kenakalan remaja	- Perusahaan
		- LPM

		- UKM
5	Masih banyak ARTM karena Pendidikan masih rendah serta kurangnya keterampilan dan modal usaha	- Sekolah
		- LPM
		- Kader-kader Pemberdayaan
6	Jembatan penghubung Dusun dan Desa belum ada	-Batu
		- Pasir
		- Tenaga gotong royong dan pekerja
7	MCK masyarakat masih belum berfungsi dengan baik	-Batu
		- Pasir
		- Tenaga gotong royong dan pekerja
8	Pembuangan sampah belum maksimal sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap	- Kendaraan
		- Lahan pembuangan
		- Tenaga pekerja
9	Kelompok kesenian tradisional karawitan dan kuda lumping belum memadai perlengkapan, masih menyewa	- Kelompok kesenian
		- LPM
		- Kader-kader Pemberdayaan
10	Anak-anak balita belum mendapat pendidikan PAUD	-LPM dan PKK
		- Kader-kader di Desa
		-
11	Produktifitas budidaya ikan air tawar kurang optimal karena kekurangan modal dan minimnya perlengkapan	- SPP
		-
		- Gotong Royong
12	Sarana dan Prasarana Olahraga masih kurang memadai dan belum ada	- Masyarakat
		- Lokasi

		- Pelatih
13	Lapangan sepak bola, halaman, trotoar sering bongkor	- Mesin Potong Rumput
		- Gotong Royong
		-
14	Bangun kios pasar sudah rusak/ lapuk dan membahayakan	- Lokasi
		- Gotong Royong
		- Dana
15	Batas Dusun belum ada sehingga kesulitan mencari batas Dusun	- Tenaga Kerja
		- Gotong Royong
		-
16	Kelompok peternak sapi dan kambing kekurangan bibit untuk pengembangbiakan dan kesulitan pengolahan pupuk organik	- Kelompok
		- LPM
		- Kader-kader Desa

Sumber : pemerintah desa jatibaru

Tabel 3.7 Pemecahan Masalah Desa

No	MASALAH	Penyebab	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
1	Jalan Desa Sering Terjadi Banjir, Licin, Longsor Karena Pembangunan Siring Dan Gorong-Gorong Serta Jembatan Dan Tanggul Penahan Tanah Belum Ada	Jalan Masih Tanah, Siring Tanah, Badan Jalan Longsor	Gorong-Gorong Perbaiki Siring Dan Penimbunan - ASPAL/LAPEN	Pengerasan/ Peningkatan Jalan Menjadi Telfort, Jembatan, Talut Penahan Tanah
2	Penghubung Jalan Antar Dusun Serta Antar Desa Belum Memadai Sehingga Perjalanan Menjadi Jauh	Jalan Masih Tanah, Siring Tanah, Badan Jalan Longsor	Gorong-Gorong Perbaiki Siring Dan Penimbunan - ASPAL/LAPEN	Pembangunan Onderlagh, Jembatan, Talut Penahan Tanah
3	Kegiatan Posyandu Masih Menumpang Di Rumah Penduduk	Belum Ada Tempat, Jauh Dari Dusun Lain	Pemyuluhan Dan Pembinaann	Pembuatan Gedung Posyandu
4	Masih Banyak Pemuda/I Belum Bekerja Sehingga Banyak Pengangguran Dan Kenakalan Remaja	Tidak Ada Sumber Dana/ Belum Punya Penghasilan	Pemyuluhan Dan Pembinaann	Lapangan Pekerjaan
5	Masih Banyak ARTM Karena Pendidikan Masih Rendah Serta Kurangnya Keterampilan Dan Modal Usaha	Belum Adanya Tempat Yang Memadai	Pembinaan Dan Pelatihan Kewirausahaan	Pelatihan Dan Modal Usaha
6	Jembatan Penghubung Dusun	Aliran Air Tidak	Gotong Royong Pembersihan	Pembuatan Jembatan

	Dan Desa Belum Ada	Lancer, Jalan Onderlah Mulai Rusak Berlubang	Jalan Dan Siring	
7	MCK Masyarakat Masih Belum Berfungsi Dengan Baik	Kaena Tidak Adanya Tempat Dan Bantuan Dana	Penyuluhan Akan Pentingnya Kebersihan	Pembuatan Mck
8	Pembuangan Sampah Belum Maksimal Sehingga Menimbulkan Bau Yang Tidak Sedap	Lahan Yang Tiddak Tersedia	Penyuluhan Akan Pentingnya Kebersihan	Penyediaan Lahan/ Kendaraan Sampah
9	Kelompok Kesenian Tradisional Karawitan Dan Kuda Lumping Belum Memadai Perlengkapan, Masih Menyewa	Tidak Ada Sumber Dana/ Kegiatan Mengandalkan Iuran	Melestrikan Budaya	Bantuan Alat Dan Perlengkapan
10	Anak-Anak Balita Belum Mendapat Pendidikan Paud	Belum Adanya Tempat Yang Memadai	Pembinaan Dan Pelatihan	Pembutan Gedung Paud
11	Produktifitas Budidaya Ikan Air Tawar Kurang Optimal Karena Kekuranag Modal Dan Minimnya Perlengkapan	Mahalnya Kolam Terpal Dan Debit	Pembinaan Dan Pelatihan Kewirausahaan	Bantuan Dana Dan Modal
12	Sarana Dan Prasarana Olahraga Masih Kurang Memadai Dan Belum Ada	Tidak Ada Atribut Dan Pagar, Lapanagn Sering Rusak	Pembinaan Dan Pelatihan	Bantuan Sarana Dan Prasarana Olahraga
13	Lapangan Sepak Bola, Halaman, Trotoar Sering Bongkor	Tidak Ada Atribut Dan Pagar, Lapanagn Sering	Rutinitas Kegiatan Membersihan Lapangan	Bantuan Alat Mesin Babat Rumput

		Rusak		
14	Bangun Kios Pasar Sudah Rusak/ Lapuk Dan Membahayakan	Bangunan Sudah Tua Dan Belum Pernah Di Rehan	Bantuan Modal	Pembuatan Kios Pasar
15	Batas Dusun Belum Ada Sehingga Kesulitan Mencari Batas Dusun	Belum Adanya Penghasilan/ Sumber Dana	Sumber Dana	Pembuatan Batas Dusun
16	Kelompok Peternak Sapi Dan Kambing Kekuranagn Bibit Untuk Pengembangbiakan Dan Kkesulitan Pengolahan Pupuk Organik	Tidak Ada Sumber Dana/ Kegiatan Mengandalkan Iuran	Pembinaan Dan Pelatihan Kewirausahaan	Bantuan Modal
17	Jenis Pertanian Tadah Hujan. Pada Musim Kemarau Aktifitas Pertanian Berhenti Karena Tidak Ada Air Untuk Mengairi Sawah/ Ladang	Tidak Tersediannya Sumur Bor	Harus Adanya Sumber Air Yang Tersedia	Sumur Bor
18	Pada Musim Pancaroba Banyak Masyarakat Desa Terserang Cikungunya, Demam, Batuk Dan Diare	Musim Yang Tidak Menentu	Harus Adanya Sumber Air Yang Tersedia	Bantuan Fogging
19	Parit Buruk Karena Belum Ada Saluran Air Yang Memadai Sehingga Musim Penghujan Banyak Terserang Penyakit	Siring Yang Tidak Mengalir Pada Mestinya	Harus Adanya Sumber Air Yang Tersedia	Pembuatan Draenase Secara Permanen

20	Bila Terjadi Hujan Lebat Sering Banjir Air Tidak Tertampung Karena Saluran Air Kurang Maksimal Dan Sering Kali Air Mengenang Di Jalan	Siring Yang Tidak Mengalir Pada Mestinya	Harus Adanya Sumber Air Yang Tersedia	Pembuatan Tanggung Secara Permanen
21	Sulit Mendapatkan Air Bersih/Kekurangan Air Bersih Pada Musim Kemarau	Tidak Tersedianya Air Bersih	Harus Adanya Sumber Air Yang Tersedia	Sumur Bor
22	Musim Kemarau Kekurangan Pangan	Tidak Tersedianya Air Bersih	Harus Adanya Sumber Air Yang Tersedia	Lumbung Pangan
23	Pada Musim Penghujan Sering Terjadi Siring Longsor Karena Belum Ada Penahan Tanah	Tahah Yang Labil	Harus Adanya Sumber Air Yang Tersedia	Pembuatan Draenase Secara Permanen
24	Di Musim Kemarau Peternak Sapi Dan Kambing Kesulitan Mencari Makanan Ternak	Tidak Ada Sumber Dana/ Kegiatan Mengandalkan Iuran	Harus Adanya Sumber Air Yang Tersedia	Adanya Lahan Yang Cukup Dan Memadai
25	Kepala Desa Dan Perngkat Desa Siltap Dan Tunjangan Masih Di Bawah UMK Serta Dana Dari ADD Masih Defisit Sehingga Kerja Perngkat Kurang Maksimal	Dari Pemerintah Tidak Menghitung Kelayakan Hidup Perangkat	Siltap Kepala Desa Dan Perangkat Yang Sesuai	Siltap Yang Sesuai Dengan Standar
26	Biaya Operasional Pemerintahan Desa Masih Rendah	Bantuan Dari Pemerintah Yang Relatif Kecil Bahkan Dikatkan Tidak Ada	Perhatian Dari Pemerintah	Bantuan Dana Dan Modal

27	Belum Maksimal LPM Dalam Menjalankan Tugasnya Karena Minimnya Biaya Operasional Dan Tidak Ada Tunjangan	Tidak Ada Bantuan Dari Pemerintah	Perhatian Dari Pemerintah	Bantuan Op Lpm Yang Sesuai
28	Biaya Operasional RT/RW Masih Rendah	Bantuan Dari Pemerintah Yang Relatif Kecil Bahkan Dikatkan Tiadk Ada	Perhatian Dari Pemerintah	Bantuan Op Rt/Rw Yang Sesuai
29	Belum Maksimal BPD Dalam Menjalankan Tugasnya Karena Minimnya Biaya Operasional Dan Tunjangan	Bantuan Dari Pemerintah Yang Relatif Kecil Bahkan Dikatkan Tiadk Ada	Perhatian Dari Pemerintah	Bantuan Op Bpd Yang Sesuai
30	Kegiatan PKK Desa Belum Semuanya Berjalan	Bantuan Dari Pemerintah Yang Relatif Kecil Bahkan Dikatkan Tiadk Ada	Perhatian Dari Pemerintah	Bantuan Dana Dari Pemerintah
31	Keterbatasan Alokasi Pupuk Bersubsidi Dari Pemerintah Dan Kurang Sadar Petani Menggunakan Pupuk Kompos	Pupuk Yang Mahal Dan Sulit Mendapatkannya	Subsidi Pupuk Dari Pemerintah	Penyediaan Pupuk Yang Mudah Dari Pemerintah
32	Pelaksanaan Kegiatan Risma Belum Berjalan Dengan Baik Maka Perlu Mendapatkan Pembinaan	Tidak Adanya Pembinaan	Pembinaan Dari Semua Pihak	PEMBINAAN DAN PEETIHAN
33	Kegiatan Kepemudaan Dalam Olahraga Belum Maksimal Sering Terbentur Dana Dan Sarana	Tidak Adanya Pembinaan	Pembinaan Dari Semua Pihak	PELATIHAN SERTA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA

34	Kurangnya Perhatian Dari Pemerintah	Tidak Adanya Pembinaan	Pembinaan Dari Semua Pihak	PEMBINAAN DAN PEETIHAN SERTA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
35	Kegiatan Posyandu Masih Numpang Di Rumah Penduduk Dan Anak Balita Belum Mendapatkan Gizi Yang Baik	Belum Adanya Tempat Yang Memadai	Bantuan Saran Dan Prasarana	Sarana Dan Prasarana Posyandu
36	Belum Ada Operasional Untuk Hansip Dan Limnas	Bantuan Dari Pemerintah Yang Relatif Kecil Bahkan Dikatkan Tiadk Ada	Perhatian Dari Pemerintah	Bantuan Op Linmas
37	Anak Balita Belum Semua Mendapat Pendidikan PAUD	Belum Adanya Tempat Yang Memadai/ Dan Pembinaan Yang Tidak Ada	Sosialisai Dari Pemerintah Tentang Pndidikan	Penyuluhan Dan Pembinaan
38	Pengembangan Ternak Masih Terhambat Modal Dan Penyuluhan Dari Dinas	Tidak Ada Sumber Dana/ Kegiatan Mengandalkan Iuran	Bantuan Modal	Bantuan Sarana Dan Prasarana
39	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Masih Terhambat Modal Dan Penyuluhan Dari Dinas	Tidak Ada Sumber Dana/ Kegiatan Mengandalkan Iuran	Bantuan Modal	Pengembnagan Ekonomi Produktif
40	Kekurangan Modal Dan Alat	Tidak Ada Sumber Dana/ Kegiatan Mengandalkan Iuran	Bantuan Modal	Pemberian Fasilitas Yang Memadai

41	Kekurangan Alat-Alat Sehingga Peralatan Yang Digunakan Masih Seadanya	Tidak Ada Sumber Dana/ Kegiatan Mengandalkan Iuran	Bantuan Modal	Fasilitas Alat
----	---	--	---------------	----------------

Sumber : *Pemerintah Desa Jati*



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data Responden

Dalam penelitian ini, responden adalah masyarakat dan orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan add dan memiliki tugas atau ikut berpartisipasi dalam pengelolaan add desa tanjung baru kecamatan tanjung bintang. Oleh karena itu, peneliti telah menentukan responden dalam penelitian ini dari hasil yang diperoleh, terdapat 20 orang responden (data yang terlampir) yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan kesejahteraan, ketua bpd (badan permusyawaratan desa) dan Anggota lpmd (lembaga pemberdayaan masyarakat desa, serta 1kepala dukuh di desa jatibaru kecamatan tanjung bintang dan 12 orang masyarakat jati baru kecamatan tanjung bintang. Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari persentase dari usia,jenis kelamin dan pendidikan.

1. Responden Berdasarkan Usia

Table 4.1 data responden berdasarkan usia

Usia	Jumlah orang	Presentase %
20 – 30 Tahun	7	35%
31-40 Tahun	6	30%
41 – 50 Tahun	5	25%
51 - 60 Tahun	2	10%
Total	20	100%

2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Presentase %
Laki –laki	13	65%
Perempuan	7	35%
Total	20	100%

Berdasarkan tabel 5.3 dapat kita ketahui bahwa jumlah responden laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah responden perempuan. Dalam penelitian ini hanya terdapat 7 responden wanita dan sisanya sebanyak 13 orang responden laki-laki.

3. Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah orang	Presentase %
SMA	13	65%
D3	4	20%
S1	3	15%
Total	20	100%

Berdasarkan tabel 5.4 dapat kita ketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir sebagian besar responden adalah SMA, yakni sebesar 65% persen

atau sebanyak 13 orang. Lainnya sebanyak 4 responden berpendidikan D3 dan 3 responden berpendidikan S1

B. Penerapan prinsip good governance

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber berikut ini merupakan analisis dari penerapan prinsip-prinsip good governance yaitu:

1. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Peranan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memajukan kesejahteraan suatu desa, terutama yaitu ekonomi suatu desa, oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa diawali dari perencanaan hingga pengawasan dari pelaksanaan APBDes itu sendiri.

a. Hasil wawancara dengan kepala Desa

“ Musrembang dihadiri oleh tokoh masyarakat , semua Aparat Desa, BPD ,LPM dan terkait di dalam nya wakil wakil masyarakat untuk menghasilkan musrembang itu sendiri ”.⁶⁵

Dari hasil wawancara tersebut, kepala desa ingin menyampaikan bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan mengikuti musrembang.

pendapat ini juga didukung oleh Sekdes dan Bendahara Desa sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Pemerintahan Desa, masyarakat sudah berperan aktif pada saat Musrembang

⁶⁵ wawancara, Bapak Bahrudin, Kepala Desa, 11 April 2019

dilaksanakan. Kegiatan Musrembang dihadiri oleh masyarakat-masyarakat yang berperan langsung dalam perencanaan APBDes seperti semua Aparat Desa, Bpd, Lpm, RT, RW, Karang Taruna, Ibu PKK, dan berbagai tokoh masyarakat lain.

Sedangkan Peran masyarakat Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, masyarakat dinilai kurang berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan karena yang biasanya mengawasi pelaksanaan perencanaan APBDes hanya masyarakat yang berpartisipasi langsung dalam Musrembang seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat lainnya. Sedangkan sebagian besar masyarakat desa yang tidak mengerti dengan pengelolaan keuangan desa, merasa bahwa tidak perlu terlibat dalam pengawasan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan kepala desa jatibaru kecamatan tanjung bintang:

“Kalau masyarakat biasa, kebanyakan dari mereka itu tidak mau tahu dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa, karena kurang nya SDM di masyarakat”.⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut, menurut kepala desa masyarakat sekitar banyak yang tidak mau tahu tentang pengelolaan keuangan desa karena kurang nya SDM di

⁶⁶ *Ibid.*

masyarakat terutama terkait dengan pengawasan, sehingga masyarakat tidak tertarik dan turut ikut dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

b. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa jati baru

“Karena masyarakat desa jati baru banyak yang tidak tau tentang pengelolaan keuangan desa, jadi mereka tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat desa belum dapat diterapkan di desa Jati Baru ini.”⁶⁷

Dari kutipan wawancara tersebut, ani laras wati mengungkapkan bahwa masyarakat banyak yang tidak tahu mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat desa belum dapat diterapkan secara maksimal.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat desa dan juga aparatur desa dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang berperan aktif dan belum dapat menjalankan fungsi pengawasan dalam mengawasi pelaksanaan APBDes di desa Jatibaru.

2. Prinsip transparansi

Setelah APBDes disahkan, pemerintah memasang banner terkait laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat agar

⁶⁷ Sumber wawancara , ani laraswati, masyarakat desa jatibaru, 18 april 2019

masyarakat mengetahui terkait pengelolaan alokasi dana desa Jatibaru kecamatan tanjung bintang.

Berikut ini merupakan wawancara dengan sekretaris desa jati baru

“ketika pemerintah akan merealisasikan pembangunan seperti pembangunan jalan paving blok di dusun A contohnya volume sebesar 1000 meter setiap kita akan melakukan pelaksanaan kita pasang plang

informasi disitu dibangun paving blok dengan dana sekian pelaksana si A ,si B dengan sistem nya seperti apa kalau tempat kita sewa kelola karna memang setiap pekerjaan yang di dadani oleh dana desa yang kita lakukan harus melibatkan masyarakat setempat”⁶⁸

Dari hasil wawancara tersebut pemerintah sudah memberikan informasi terkait pengelolaan alokasi dana desa dengan cara memasang banner di kantor balai desa terkait dengan APBDes dan memasang plang terkait pembangunan desa oleh karena itu bisa di simpulkan bahwa pemerintah desa sudah menjalankan prinsip transparasi terkait pengelolaan alokasi dana desa

3. Prinsip Akuntabilitas

⁶⁸ Sumber Wawancara ,Bapak Sutrisno,Sekretaris Desa,04 Maret 2019

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggung jawabkan kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Selain tanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa juga memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. Bentuk tanggung jawab yang diberikan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dapat berupa pembinaan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan kepala desa :

“setiap pembinaan yang dilakukan pemerintah insyallah bisa di terima oleh masyarakat pemerintah pembinaan seperti , pkk , posyandu , kepem-udaan karang taruna dll nya”.⁶⁹

Dari analisis hasil wawancara tersebut, pemerintah telah memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui lembaga pkk , posyandu , kepemudaan karang taruna namun peneliti menemukan bahwa tidak adanya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat awam , oleh karena itu sebagian besar masyarakat awam belum memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa secara lebih mendalam di Desa Jati baru.

⁶⁹ Sumber Wawancara Bapak Bahruddin, Kepala Desa ,11 April 2019

Dampaknya, masyarakat merasa tidak mau tahu mengenai pengelolaan keuangan desa tersebut, sehingga sebagai dampaknya, masyarakat kurang mau berpartisipasi dalam pengelolaan tersebut terutama dalam pengawasan.

selanjutnya terkait laporan realisasi kepada masyarakat apabila masyarakat mau mengetahui tentang rincian laporan Realisasi dan Pertanggung jawaban tersebut, masyarakat diberikan akses untuk mengetahui laporan realisasi dan pertanggung jawaban tersebut. Tetapi karena Pemerintah Desa Jati Baru belum memiliki situs resmi, maka masyarakat yang ingin mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa harus langsung datang ke kantor kepala desa.

Dari analisis diatas, prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan, tetapi belum baik karena Pemerintah Desa merasa rincian laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban tidak perlu disampaikan kepada masyarakat, tetapi masyarakat memiliki hak untuk mengakses laporan tersebut. Selain itu, masyarakat juga diberikan hak untuk mengkritik Pemerintahan Desa agar dapat berjalan dengan lebih baik.

C. Deskripsi Hasil Kuesioner

Deskripsi ini berisi data penelitian atau hasil dari kuesioner yang telah disebarakan tentang variabel yang digunakan. Deskripsi hasil

kuesioner memuat jumlah jawaban ya dan tidak, Berikut ini merupakan deskripsi hasil kuesioner secara rinci:

Tabel 4.4 Data hasil kuisisioner partisipasi masyarakat

No	Pertanyaan	Ya	Presentase	Tidak	Presentase
1	Apakah ada kegiatan musrembang terkait penge - lolaan alokasi dana desa ?	18	90%	2	10%
2	Apakah Tingkat Keaktifan Masyarakat Desa Dalam Melakukan Pengawasan Anggaran Desa Sangat Rendah ?	12	60%	8	40%
3	Apakah Tingkat Partisipasi Masyarakat Masih Rendah Terkait Pengelolaan Keuangan Desa?	13	65%	7	35%
4	Apakah Sebagian Besar Masyarakat Desa Yang Tidak Mengerti Dengan Pengelolaan Keuangan Desa , Merasa Bahwa Tidak Perlu Terlibat Dalam Pengawasan Penge lolaan Alokasi Dana Desa?	11	55%	9	45%

Tabel 4.5 Data Hasil Kuesioner Transparansi

No	Pertanyaan	Ya	Presentase	Tidak	Presentase
5	Terkait Laporan Pertangg - ung jawaban, Apakah Juga Di informasi kan Kepada Masyarakat Misal Dalam Bentuk Tertulis Atau Lisan ?	18	90%	2	10%
6	Apakah Masyarakat di beri -kan Ijin Untuk Meng akses Mengenai Pengelo - laan Keuangan Desa Seperti Laporan Realisasi	10	50%	10	50%

	Anggaran Atau Pertanggung jawaban ? Dari Pemerintahan Desa?				
--	--	--	--	--	--

Tabel 4.6 Data hasil kuisioner Akuntabilitas

No	Pertanyaan	Ya	Presentase	Tidak	Presentase
7	Apakah Pemerintah desa Sudah Melakukan Pembinaan Dalam Menjalankan Kewajiban Mereka Bagi Masyarakat ?	17	85 %	3	15 %
8	Apakah ada laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan , masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian , hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa ?	18	90 %	2	10 %
9	Apabila Terdapat Perubahan Apbdesa, Apakah Pemerintah Desa Kembali Bermusyawarah Bersama Masyarakat ?	17	85 %	3	15 %

Dari data hasil kuesioner diatas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar responden menyetujui telah diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan ADD namun dalam hal partisipasi masyarakat sebagian responden menjawab masih kurang nya partisipasi masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa.

Dari tabel 5.5, kita dapat melihat bahwa sebagian besar responden setuju adanya musyawarah perencanaan ADD (musrembang) hal ini ditunjukkan dengan sebesar 90 persen responden menjawab iya untuk pertanyaan atau item nomor 1 namun dalam hal partisipasi masyarakat terkait dengan pengawasan alokasi dana desa

sebagian responden menjawab bahwa tingkat keaktifan masyarakat desa dalam melakukan pengawasan anggaran desa sangat rendah hal ini ditunjukkan dengan data hasil kuisioner sebesar 60 persen responden menjawab iya untuk pertanyaan atau item nomor 2, hal ini diperkuat pada pertanyaan nomor 3 berdasarkan data kuisioner sebesar 65 persen responden menjawab iya bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terkait pengelolaan keuangan desa, terkait kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa hal ini ditunjukkan dengan data hasil kuisioner sebesar 60 % responden menjawab iya bahwa sebagian besar masyarakat desa yang tidak mengerti dengan pengelolaan keuangan desa, merasa bahwa tidak perlu terlibat dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa, karena sebagian responden menjawab iya pada pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 maka masih bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap masih kurangnya partisipasi masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa.

Selanjutnya, dari tabel 5.6 kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar responden setuju prinsip transparansi juga telah diterapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa kita dapat melihat bahwa sebagian besar responden setuju adanya laporan pertanggungjawaban yang diinformasikan kepada masyarakat misal dalam bentuk tertulis atau lisan hal ini ditunjukkan dengan sebesar 90 persen responden menjawab iya untuk item no 5, selanjutnya untuk item nomor 6 sebagian responden juga

menjawab iya terkait pertanyaan Apakah Masyarakat Diberikan Ijin Untuk Mengakses Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Seperti Laporan Realisasi Anggaran Atau Pertanggungjawaban Hal ini ditunjukkan dengan sebesar 65 persen responden menjawab iya.

karena sebagian responden menjawab iya pada pertanyaan nomor 1 dan 2 maka masih bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar responden setuju telah di terapkan prinsip transparasi terkait pengelolaan alokasi dana desa.

Selanjutnya, dari Tabel 5.7 kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar Responden setuju prinsip akuntabilitas juga telah diterapkan dalam tiap proses Pengelolaan add. Sebagian besar responden setuju bahwa Pemerintah Desa Sudah Melakukan Pembinaan Dalam Menjalankan Kewajiban Mereka Bagi Masyarakat dan ada laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian, hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa ,Hal ini dibuktikan dengan sebesar 85 persen responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 7, selanjutnya untuk pertanyaan item nomor 8 sebagian responden menjawab ada laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian, hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa hal ini di tunjukan dengan data hasil kuisisioner sebesar 90 % responden menjawab iya dan 10 % jawaban tidak yang berasal dari dua orang responden, yang merupakan sebagian masyarakat awam desa jati baru

yang berpendapat bahwa kurang mengetahui terkait pengelolaan alokasi dana desa. Selanjutnya untuk pertanyaan item nomor 9 sebagian responden menjawab iya terkait Apabila Terdapat Perubahan Apbdesa, Pemerintah Desa Kembali Bermusyawarah Bersama Masyarakat hal ini di tunjukan oleh hasil data kuisisioner sebagian responden menjawab 85% iya, karena sebagian besar responden menjawab iya pada pertanyaan nomor 7,8 dan 9, maka masih bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar reponden setuju prinsip Akuntabilitas telah diterapkan.



D. Penerapan prinsip *good governance* Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance*. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit bahasan penerapan *good governance* pada pemerintahan. Sebenarnya, konsep *good governance* yang ada dalam Al-Qur'an tak hanya dapat diaplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang konsep *accountability*, *transparency*, dan *syura*.

1. ***Accountability*** atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di-*hisab* (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak QS 99:7-8). Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Dalam kaitannya dengan konsep *good governance*, komitmen seorang pemimpin (dan juga para pemegang amanah di pemerintahan) akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju *good governance*. Komitmen sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, karena hal ini akan berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab seseorang dalam memegang amanahnya menjadi seorang *leader*.

Seorang pemimpinlah yang akan mempengaruhi pengikutnya (dalam konteks pemerintahan adalah para jajaran stafnya) menuju ke arah yang lebih baik (*good governance*). Dalam pengelolaan dana desa di Desa Jatibaru komitmen dan tanggung jawab yang kuat dari seorang pemimpin telah diterapkan.

2. Transparansi

Konsep transparansi (*transparency*) dalam ajaran agama Islam, telah disebutkan Allah SWT sejak 1400 tahun yang lalu dalam firman-Nya yang menyebutkan, *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya... Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah...”* (QS 2:282). Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dengan masyarakat. hal ini telah sesuai dengan pembuatan laporan APBDes dan pemasangan plang laporan realisasi APBDes yang dibuat di desa jatibaru kecamatan tanjung bintang.

3. **Partisipasi Masyarakat** Dari nilai dasar syura ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat melalui musyawarah, Adanya partisipasi masyarakat luas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan adalah salah satu prinsip penting *good governance*. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek belaka dari suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut. Hal ini juga sesuai dengan partisipasi masyarakat desa jatibaru dengan diadanya musyawarah diharapkan dapat memberikan legitimasi lebih besar dan dukungan kuat terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan di lapangan dan analisis yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. penerapan prinsip good governance di desa jatibaru telah diterapkan dengan cukup baik.
2. Pelaksanaan good governance prespektif islam sudah di terapkan dengan cukup baik hal ini di dasarkan dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik

B. Saran

1. Untuk memenuhi penerapan prinsip partisipasi masyarakat, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan alokasi dana desa dalam membangun desa jatibaru terutama dalam hal pengawasan masyarakat dalam pengawasan alokasi dana desa.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan partisipan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggung jawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.



Daftar Pustaka

- Amin, Zainul Ittihad. 2013. *Pendidikan kewarganegaraan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Andrianto, nico. (2007) *good governance: transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*.
- AT- THAYYIB AL-QUR'AN. *Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2001.
- Bandung, pt. Refika aditama Lembaga administrasi negara 2003 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (2003). Jakarta.
- Dwipayana, ari dan sutoro eko, 2003. *Membangun good governance di Desa*, yogyakarta: ire press
- Faridah dan Suryono, Bambang. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Halim, Abdul dkk. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hanifah, Suci Indah dan Praptoyo, Sugeng. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
- Huri, Risti Valentina. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Irma, Ade. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. Jurnal. Palu: Universitas Tadulako.

Jurnal administrasi publik (jap) vol. 3, no. 7, hal. 1099-1104

Jurnal Akuntansi Multiparadigma, JAMAL. Volume 8, Nomor 2. Halaman 227-429. Malang, Agustus 2017

Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Malang, bayumedia Ibrahim, amin. (2008) pokok-pokok administrasi publik dan implementasinya.

Masyhuri dan zainudin, m. (2008) metodologi penelitian pendekatan praktis dan aplikatif. Bandung, pt.refika aditama

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, cet. Ke 20. Bandung: Alfabeta, 2014.

Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).

Riskasari. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Jurnal. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.